

RENCANA STRATEGI TAHUN 2024 – 2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIKKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaanNya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka telah selesai disusun.

Rencana Strategis Dinas ini disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, point KESATU c; Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 perlu menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/ outcome serta penerapan indikator- indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan untuk mengukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon usul saran serta koreksi dari semua pihak. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Maumere, 9 Maret 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka,



AWALES SYUKUR, S.Sos, M.Th
Pembina Tingkat I
NIP. 19740117 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	V
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIKKA	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-26
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	III-1
3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah	III-4
3.3 Penentuan Isu Strategis.....	III-5
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupeten	
2.1 Sikka	II-20
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.2 Kabupaten Sikka	II-27
Tabel Nama Media Massa	II-29
2.3	
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan	
2.4 Informatika Kabupaten Sikka	II-32
Tabel Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	III-3
3.1	
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan	
3.2 Informatika Kabupaten Sikka	III-5
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi	
4.1 dan Informatika Kabupaten Sikka	IV-2
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
5.1	
Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas	
6.1 Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	VI-2
Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	
7.1 Sikka Tahun 2024-2026	VII-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-16

GAMBAR GRAFIK

	Halaman
Gambar Grafik 2.1 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	II-17
Gambar Grafik 2.2 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon	II-17
Gambar Grafik 2.3 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	II-18
Gambar Grafik 2.4 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	II-18
Gambar Grafik 2.5 Grafik Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-19
Gambar Grafik 2.6 Grafik Jumlah Pegawai Honorer berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Renstra disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, point KESATU c; Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, perlu menyusun Renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) tahun.

Selain itu juga dapat mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka periode 2024-2026 perlu diselaraskan antara indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tata cara penyusunan Renstra mulai dari proses persiapan penyusunan Renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun; orientasi mengenai penyusunan Renstra; penyusunan agenda kerja tim; dan penyiapan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renstra yang meliputi gambaran pelayanan; permasalahan; isu strategis; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran; penyusunan rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai organisasi perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra dengan mengacu pada berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs dan Tindak Lanjutnya;
18. Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor ... Seri)
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun ... Nomor ,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun ... Nomor);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor)
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
36. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 dimaksudkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

➤ Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 disusun dengan tujuan :

- a. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tahun 2024 - 2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka.
- b. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- c. Sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi tentang : Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika memuat tentang : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika, serta Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis. Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdiri dari : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, serta Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran memuat tentang : Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

BAB VI : Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan. Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja serta kebutuhan Pendanaannya.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam tiga tahun mendatang.

BAB VIII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIKKA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIKKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang urusan Komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, sehingga Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. maka Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknik yang meliputi perencanaan, keuangan, tatausaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kominfo. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Sekretaris

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, dibantu oleh:

1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sub bagian program, evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan program evaluasi dan program.
- c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset.
- c. Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset.
- d. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.
- c. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan persuratan.
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor.

- d. Pelaksanaan pengelola perlengkapan dan barang milik Negara.
- e. Pelaksanaan usulan administrasi aparatur sipil Negara.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, dibantu oleh:

1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
- b. Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat).
- c. Pengolahan aduan masyarakat.
- d. Pelaksanaan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral.
- e. Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah.
- f. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Analisis Data

Seksi Pengelolaan Informasi dan Analisis Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengelolaan Informasi dan Analisis Data menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah.
- b. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal.
- c. Pembuatan konten lokal.
- d. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal.
- e. Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah.
- f. Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.
- g. Pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Telekomunikasi
Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat.
- d. Pengelolaan hubungan dengan media (media relations).
- e. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah

(briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi(TIK) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi(TIK) dibantu oleh :

1. Seksi Infrastruktur Jaringan Keamanan Komunikasi

Seksi Infrastruktur Jaringan Keamanan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Infrastruktur Jaringan Keamanan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government.
- b. Pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika,

Government Cloud Computing.

- c. Pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik.
- d. Pelaksanaan layanan filtering konten negative.
- e. Pelaksanaan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- f. Pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah.
- g. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.
- h. Pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik.
- i. Pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi.
- j. Pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi.
- k. Pelaksanaan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.
- l. Pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- m. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Elektronik Government

Seksi Elektronik Government mempunyai tugas melaksanakan Seksi penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Elektronik Government menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan.
- b. Penyelenggaraan Layanan recovery data dan informasi.
- c. Penyelenggaraan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan.

- d. Penyelenggaraan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik.
 - e. Penyelenggaraan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
 - f. Penyelenggaraan Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.
 - g. Penyelenggaraan Layanan interoperabilitas.
 - h. Penyelenggaraan Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah.
 - i. Penyelenggaraan Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City).
 - j. Penyelenggaraan Layanan Sistem Informasi Smart City.
 - k. Penyelenggaraan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat.
 - l. Penyelenggaraan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City.
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Layanan Penetapan Kebijakan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Seksi Layanan Penetapan Kebijakan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Layanan Penetapan Kebijakan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan

terpadu implementasi e-Government Kabupaten.

- b. Penyelenggaraan Layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah.
- c. Penyelenggaraan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten.
- d. Penyelenggaraan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK.
- e. Penyelenggaraan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City.
- f. Penyelenggaraan Layanan implementasi e-Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan Smart City.
- g. Penyelenggaraan Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan serta penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- h. Penyelenggaraan Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten.
- i. Penyelenggaraan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, penetapan dan perubahan nama Pejabat Domain, penetapan dan perubahannama domain dan sub domain, penetapan tata kelola nama domain dan sub domain.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Statistik.

Bidang Statistik mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan statistik sektoral, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan perencanaan kegiatan bidang statistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan di bidang statistik.
- b. Pelaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas statistik di kabupaten.
- c. Pelaksanakan analisis penilaian statistik sesuai kewenangan.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang statistik.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Statistik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1. Seksi Pengumpulan Data Statistik

Seksi Pengumpulan Data Statistik mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan, melaporkan program dan rencana kegiatan pada Seksi Pengumpulan Data Statistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengumpulan Data Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengumpulan Data Statistik.
- b. Penyusunan program dan rencana kegiatan pengembangan pengumpulan data statistik.
- c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengumpulan Data Statistik.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengumpulan Data Statistik.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pengolahan dan Analisis Data Statistik

Seksi Pengolahan dan Analisis Data Statistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaporkan program dan rencana kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Analisis Data Statistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengolahan dan Analisis Data Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengolahan Data Statistik.
- b. Penyusunan program dan rencana kegiatan pengembangan pengolahan data statistik.
- c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengolahan Data Statistik.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengolahan Data Statistik.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Layanan Publikasi Statistik

Seksi Layanan Publikasi Statistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaporkan program dan rencana kegiatan pada Seksi Layanan Publikasi Statistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Layanan Publikasi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Layanan Publikasi Statistik.

- b. Penyusunan program dan rencana kegiatan pengembangan layanan publikasi statistik.
- c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Layanan Publikasi Statistik.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Layanan Publikasi Statistik.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi, dengan jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi termasuk aset dan fasilitas perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian.
- b. Penyusunan program dan kegiatan tata kelola persandian.
- c. Penyusunan program dan kegiatan operasional pengamanan persandian.
- d. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang persandian dibantu oleh :

1. Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Tata Kelola Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi.
- c. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi.
- d. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah.
- e. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan

- sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi.
- f. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah.
 - g. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi.
 - h. Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi.
 - i. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.
 - j. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.
 - k. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian.
 - l. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi.
 - m. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian
- Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Operasional Pengamanan Persandian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten.
 - b. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten.
 - c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi.
 - d. Pengukuran kerawanan dan keamanan informasi.
 - e. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten.
 - f. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di

lingkungan kabupaten.

- g. Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten.
- h. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten.
- i. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya.
- j. Pengamanan informasi elektronik.
- k. Pengelolaan Security Operation Centre (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi.
- l. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.
- m. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian menyelenggarakan fungsi :

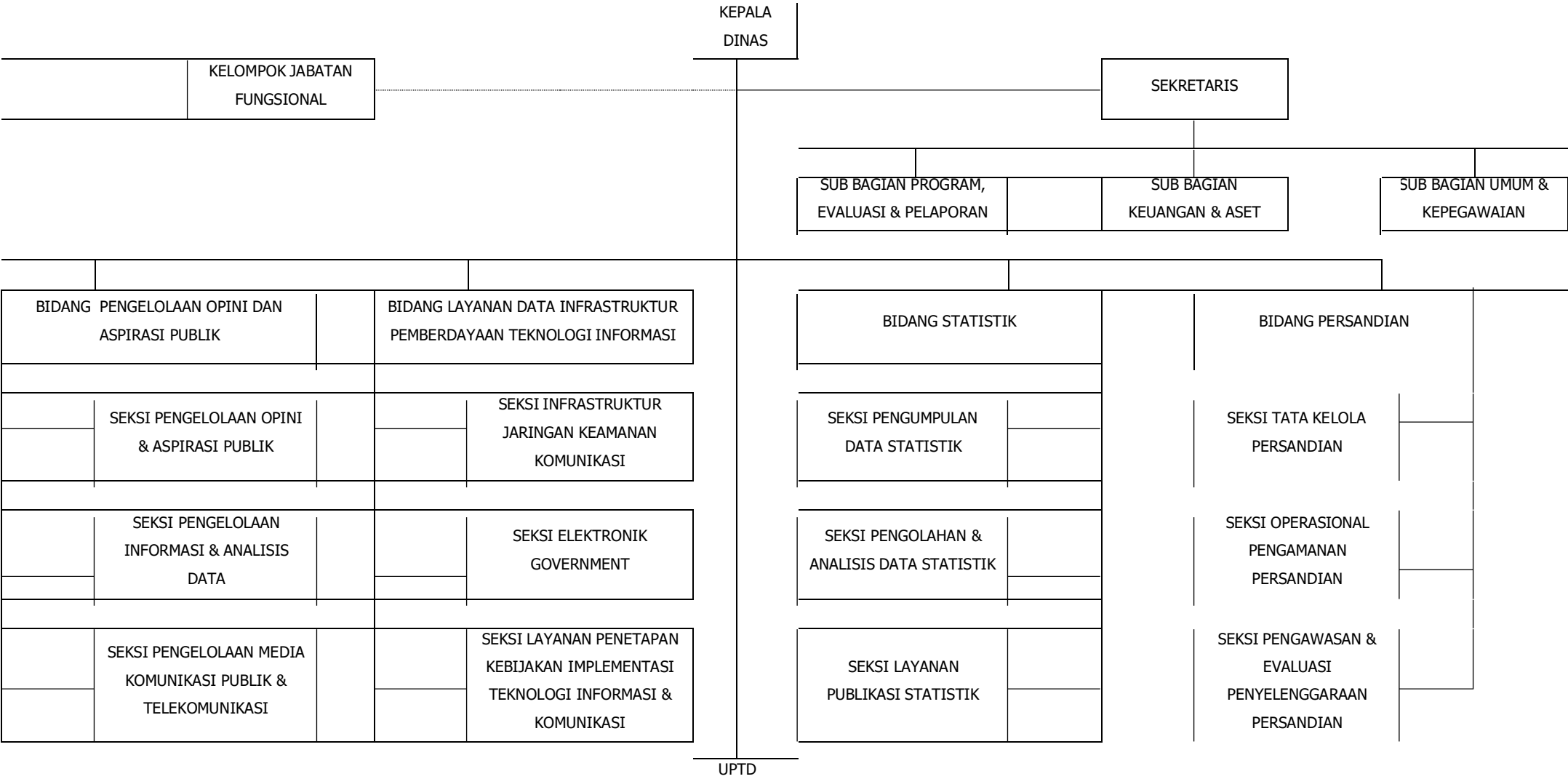
- a. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian.
- b. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten.
- c. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi.
- d. Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian.
- e. Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten.
- f. Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi.

- g. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian.
- h. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten.
- i. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dari uraian diatas tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. maka Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

STUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

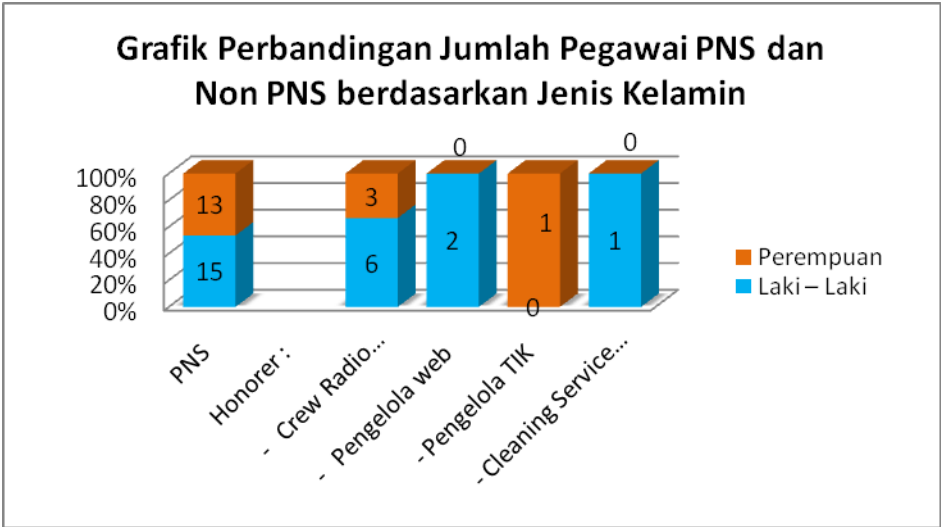


2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIKKA

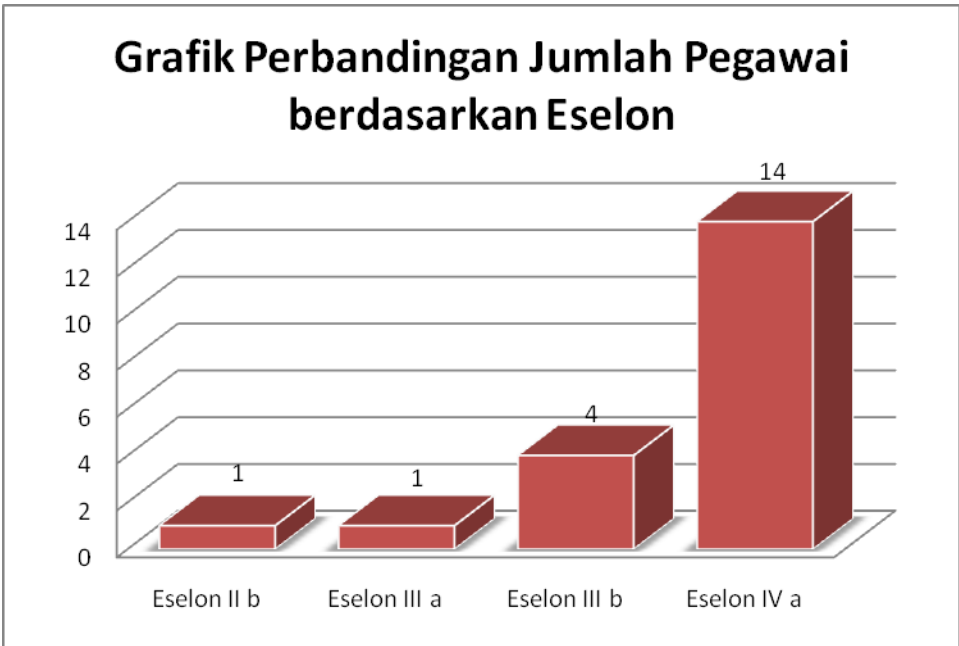
Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka di dukung oleh Sumber Daya organisasi yang terdiri dari Sumber Daya Aparatur serta Sarana dan Prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksana tugas dan fungsi organisasi jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebanyak 41 orang pegawai. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan oleh gambar grafik sebagai berikut :



Gambar 2.1 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2.2 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

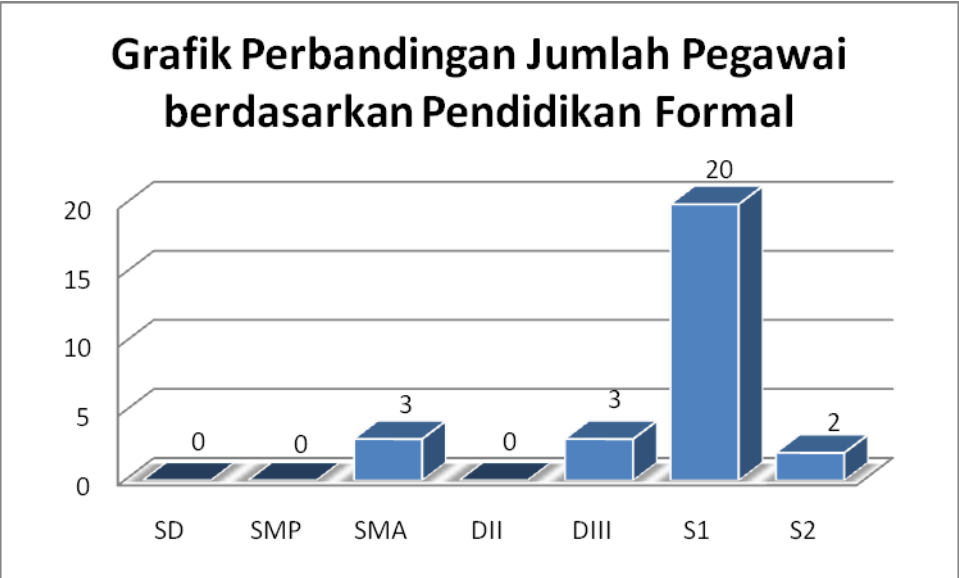
Berdasarkan Grafik diatas menunjukan bawah untuk jabatan Eselon IV a masing ada lowong 1 orang.



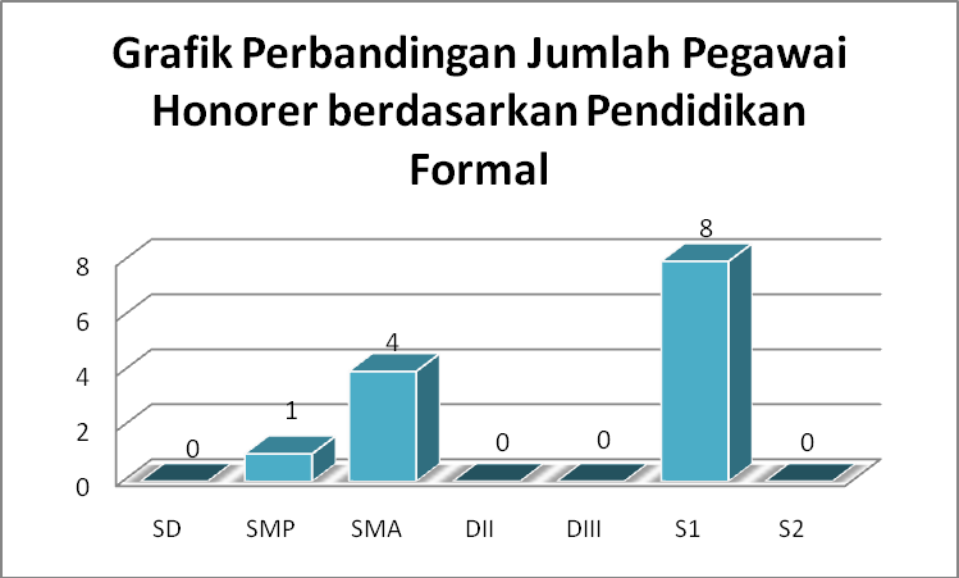
Gambar 2.3 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Gambar 2.4 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan



Gambar 2.5 Grafik Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.6 Grafik Jumlah Pegawai Honorer berdasarkan Tingkat Pendidikan

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kerja yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai daya dukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka

No. Urt	Spesifikasi Barang			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
	Nama/Jenis Barang	Merek Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	-		Pembelian	2004	3574	M2	Baik	1
2	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	-	-		Hibah	2020	400	M2	Baik	1
3	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	-	-		Hibah	2022	225	M2	Baik	1
4	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	-	-		Hibah	2022	400	M2	Baik	1
5	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	-	-		Hibah	2022	225	M2	Baik	1
6	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	-	-		Hibah	2022	225	M2	Baik	1
7	Station Wagon	Suzuki / 4C415V APV 5 TD	MHYEDN 41V61142 544 G15AID-144699	Campuran	Pembelian	2006			Baik	1
8	Sepeda Motor	Honda / Honda/ NF11B2 DIM/T	MHIJBE31 5BK04133 5 JBE3E-1041504	Campuran	Pembelian	2011			Rusak Berat	1
9	Sepeda Motor	Honda AFX12u 2 / Honda AFX12u 2	MH1JBP1 17EK1117 80 JBP1E-1111615	Campuran	Pembelian	2014	125 CC		Baik	1
10	Global Positioning System	Garmin	-	Plastik	Pembelian	2018			Baik	1
11	Lemari Besi/Metal	Brother/ dua pintu	-	Campuran	Pembelian	1995			Baik	3
12	Lemari Kayu	Olimpic	-	Kayu	Pembelian	2007			Baik	3
13	Lemari Kayu	Olimpic	-	Kayu	Pembelian	2007			Rusak Berat	9
14	Lemari Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2014			Baik	1

No. Urt	Spesifikasi Barang			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
	Nama/Jenis Barang	Merek Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Lemari Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2015			Baik	1
16	Lemari Kayu	2 Pintu	-	Kayu	Pembelian	2018			Baik	2
17	Lemari Kayu	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2019			Baik	6
18	Rak Kayu	Arinda kayu	-	Kayu	Pembelian	1992			Baik	1
19	Filing Cabinet Besi	Hitatchi / 3 susun	-	Campuran	Pembelian	1985			Baik	1
20	CCTV - Camera Control Television System	Doom AHD	-	Campuran	Hibah	2020			Baik	11
21	CCTV - Camera Control Television System	Doom AHD	-	Campuran	Hibah	2020			Baik	1
22	Papan Visual/Papan Nama	-	-	Besi Plat/Triplex	Pembelian	2017			Baik	1
23	Papan Nama Instansi	Lokal / Kayu	-	Kayu	Pembelian	2017			Baik	1
24	Papan Pengumuman	-	-	Besi Plat/Triplex	Pembelian	2017			Baik	1
25	Alat Kantor Lainnya	Kabel HDMI	-	Campuran	Hibah	2020	5 Meter		Baik	1
26	Meja Kerja Kayu	Meja 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2000			Baik	1
27	Meja Kerja Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2000			Baik	8
28	Meja Kerja Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2000			Rusak Berat	1
29	Meja Kerja Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2000			Baik	1
30	Meja Kerja Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2001			Baik	2
31	Meja Kerja Kayu	Alba/ 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2001			Baik	1
32	Meja Kerja Kayu	-	-	Campuran	Pembelian	2013			Baik	2
33	Meja Kerja Kayu	Meja 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2014			Baik	1
34	Meja Kerja Kayu	-	-	Kayu/Kaca	Pembelian	2015			Baik	1
35	Kursi Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	1995			Baik	2
36	Kursi Kayu	Standar	-	Kayu	Pembelian	2000			Baik	10
37	Kursi Kayu	Standar	-	Kayu	Pembelian	2002			Baik	2
38	Kursi Kayu	Standart	-	Kayu	Pembelian	2003			Baik	2
39	Kursi Kayu	Standar	-	Kayu	Pembelian	2003			Baik	3
40	Kursi Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2008			Baik	2

No. Urt	Spesifikasi Barang			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
	Nama/Jenis Barang	Merek Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Meja 1/2 Biro	Alba/Biro/Metal	-	Campuran	Pembelian	1987			Baik	2
42	Meja 1/2 Biro	Alba/Biro/Metal	-	Campuran	Pembelian	1995			Baik	1
43	Meja 1/2 Biro	Biro	-	kayu	Pembelian	1995			Baik	1
44	Meja 1/2 Biro	Biro	-	kayu	Pembelian	1999			Baik	1
45	Meja 1/2 Biro	-	-	Kayu	Pembelian	2003			Baik	1
46	Meja 1/2 Biro	Arinda/biro	-	kayu	Pembelian	2003			Baik	1
47	Meja 1/2 Biro	-	-	Kayu	Pembelian	2006			Baik	4
48	Meja 1/2 Biro	Oggi	-	Campuran	Pembelian	2007			Baik	1
49	Meja 1/2 Biro	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	2
50	Kursi Rapat	Napoly	-	Plastik	Pembelian	2013			Rusak Berat	2
51	Kursi Rapat	Napoly	-	Plastik	Pembelian	2013			Baik	8
52	Kursi Biasa	-	-	Campuran	Pembelian	2011			Baik	2
53	Kursi Biasa	-	-	Spon	Pembelian	2013			Baik	4
54	Sofa	-	-	kayu/spon	Pembelian	2013			Baik	1
55	Mesin Pemotong Rumput	STihl	-	Campuran	Pembelian	2017			Baik	1
56	A.C. Split	-	-	Campuran	Pembelian	2008			Baik	3
57	A.C. Split	-	-	Campuran	Pembelian	2008			Rusak Berat	1
58	A.C. Split	Uchida, 1PK / 1PK	-	Campuran	Pembelian	2015			Baik	1
59	Kipas Angin	Maspion / Berdiri	-	Campuran	Pembelian	2015			Baik	1
60	Kipas Angin	-	-	Plastik	Pembelian	2017			Rusak Berat	1
61	Kipas Angin	-	-	Plastik	Pembelian	2017			Baik	1
62	Kipas Angin	Regency	-	campuran	Pembelian	2019			Baik	3
63	Televisi	Sharp	-	Campuran	Pembelian	1989	20 "		Baik	1
64	Televisi	Samsung / TV LED	-	campuran	Hibah	2020	32 Inch		Baik	1
65	Amplifier	Toa / ZA250 S	-	campuran	Hibah	2021			Baik	1
66	Loudspeaker	Toa / ZH610 S	-	campuran	Hibah	2021			Baik	2

No. Urt	Spesifikasi Barang			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
	Nama/Jenis Barang	Merek Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Microphone	-	-	Campuran	Pembelian	2012			Baik	3
68	Microphone	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	3
69	Microphone	-	-	campuran	Pembelian	2013			Rusak Berat	1
70	Microphone	Mic Kretz	-	campuran	Hibah	2020			Baik	2
71	Camera Video	-	-	Campuran	Pembelian	2010			Baik	9
72	Camera Video	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	1
73	Tangga Aluminium	-	-	Almunium	Pembelian	2018	10 m		Baik	1
74	Handy Cam	Sony / HXR-MC2500	-	Campuran	Hibah	2020			Baik	1
75	Gordyin/Kray	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	4
76	Gordyin/Kray	-	-	Kain	Pembelian	2014			Baik	1
77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	Kain	Pembelian	2017			Baik	1
78	Meja Operator	-	-	Kayu	Pembelian	2018			Baik	1
79	Compact Disc Player	-	-	Campuran	Pembelian	2012			Baik	1
80	Modulation Monitor Speaker Kabaret	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	2
81	Modulation Monitor Speaker Kabaret	-	-	campuran	Pembelian	2013			Rusak Berat	2
82	Microphone/Boom Stand	-	-	Campuran	Pembelian	2012			Baik	2
83	Microphone/Boom Stand	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	4
84	Microphone Connector Box	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	2
85	Microphone Connector Box	-	-	Campuran	Pembelian	2013			Baik	1
86	Digital Audio Taperecorder	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	4
87	peralatan studio audio lainnya (dst)	Belden USA	-	Campuran	Pembelian	2010			Baik	1
88	peralatan studio audio lainnya (dst)	TP link	-	Campuran	Pembelian	2010			Baik	3
89	peralatan studio audio lainnya (dst)	TP link	-	Campuran	Pembelian	2010			Baik	1
90	Camera Electronic	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	1
91	Mixer PVC	-	-	Campuran	Pembelian	2012			Baik	1
92	Layar Film/Projector	Optama	-	Campuran	Pembelian	2009			Rusak Berat	1
93	Head Set	-	-	Campuran	Pembelian	2012			Baik	4
94	LCD Monitor	Animax	-	campuran	Hibah	2020			Baik	1

No. Urt	Spesifikasi Barang			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
	Nama/Jenis Barang	Merek Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Alat Studio Lainnya	Web Cam / webcam vcon	-	campuran	Hibah	2020			Baik	2
96	Alat Studio Lainnya	Kabel HDMI	-	campuran	Hibah	2020	10 Meter		Baik	1
97	Facsimile	Panasonic / KX-FT983	-	campuran	Pembelian	2018			Baik	1
98	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	linksys	-	Campuran	Pembelian	2010			Baik	1
99	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	-	-	Campuran	Pembelian	2010			Baik	1
100	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	1
101	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	-	-		Pembelian	2017			Baik	5
102	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	-	-		Pembelian	2017			Baik	5
103	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	-	-		Pembelian	2017			Baik	5
104	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	-	-		Pembelian	2017			Baik	5
105	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	RB 411	-	campuran	Pembelian	2010			Rusak Berat	2
106	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	RB 433	-	campuran	Pembelian	2010			Rusak Berat	1
107	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	1
108	Unit Pemancar MF/MW Transportable	-	-	Campuran	Pembelian	2012			Baik	1
109	Antene VHF/FM Stationary	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	1
110	Antene UHF Stationary	-	-	Campuran	Pembelian	2010			Baik	4
111	Audio Processor Am	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	1
112	P.C Unit	Simbada	-	campuran	Pembelian	2012			Rusak Berat	1
113	P.C Unit	Acer	-	campuran	Pembelian	2012			Kurang Baik	1
114	Lap Top	tosibha	-	campuran	Pembelian	2009			Rusak Berat	1
115	Lap Top	Acer E1-410	-	Campuran	Pembelian	2014			Baik	1
116	Lap Top	-	-	Campuran	Pembelian	2017			Baik	3
117	Lap Top	-	-	Campuran	Pembelian	2017			Rusak Berat	1

No. Urt	Spesifikasi Barang			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
	Nama/Jenis Barang	Merek Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Lap Top	-	-	Campuran	Pembelian	2017			Hilang	1
119	Lap Top	Asus X540L	-	campuran	Pembelian	2018			Baik	4
120	Lap Top	Acer / A514 (Aspire 5)	-	Campuran	Pembelian	2020			Baik	1
121	Lap Top	Acer / Aspire 5	-	campuran	Hibah	2020			Baik	1
122	Note Book	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	2
123	Personal Komputer lainnya	Acer	-	campuran	Pembelian	2018			Baik	1
124	peralatan mainframe lainnya (dst)	-	-	Campuran	Pembelian	2012			Baik	1
125	peralatan mainframe lainnya (dst)	-	-	campuran	Pembelian	2013			Baik	2
126	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 2700	-	Campuran	Pembelian	2017			Rusak Berat	2
127	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma / MP287	-	campuran	Pembelian	2018			Rusak Berat	3
128	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma / MP287	-	campuran	Pembelian	2018			Baik	1
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	-	Campuran	Pembelian	2019			Baik	2
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	-	campyran	Pembelian	2020			Baik	1
131	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Plustek / smart office PS283	-	campuran	Hibah	2020			Baik	1
132	Hub	Dlink/16 port	-	Campuran	Pembelian	2010			Baik	1
133	Modem	TP-Link / Outdoor 12 dBi CPE 220	-	Plastik	Pembelian	2018			Baik	6
134	Peralatan Jaringan lainnya	-	-	Campuran	Pembelian	2014			Baik	1
135	Peralatan Jaringan lainnya	SALA	-	Kulit	Pembelian	2018			Baik	1
136	Peralatan Jaringan lainnya	Ubiquiti	-	plastik	Pembelian	2018			Baik	3
137	Peralatan Jaringan lainnya	Hyperlink / dBi 2.4 ghz HG2115 U-Pro	-	Plastik	Pembelian	2018			Baik	3

No. Urt	Spesifikasi Barang			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
	Nama/Jenis Barang	Merek Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Peralatan Jaringan lainnya	PETZL	-	Kain	Pembelian	2018			Baik	1
139	Peralatan Jaringan lainnya	KRISBOW	-	Kulit	Pembelian	2018			Baik	1
140	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	1983	150	M2	Baik	1
141	Bangunan Menara Radio	-	Dishubko minfo.05/PPK.II/VII I/2012		Pembelian	2012		M2	Baik	1
142	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	-	Dishubko minfo.551.1.3/248/PPK/XII/2015	Campuran	Pembelian	2015		M2	Baik	1
143	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	-	-		Pembelian	2012		M2	Baik	1

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika diukur sesuai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja yaitu :

1. Indeks SPBE Kabupaten Sikka
2. Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE
3. Cakupan Aplikasi yang terintegrasi
4. Jumlah Desa yang didukung pembangunanfasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Persentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi
6. Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo
7. Indeks profesionalitas ASN
8. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap 8 (delapan) indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks SPBE Kabupaten Sikka	Indeks	0	0,97	0,97	0,97	1	0,97	0,97	0,97	0,97	1,83	0	1	1	1	1,83
2	Cakupan PD yang mengimplementasikan SPBE	%	0	0	33,33	6,67	6,67	0	30	33,33	0	36,67	0	0	1	0	5,50
3	Cakupan Aplikasi yang terintegrasi	%	0	0	0	0	16,67	0	0	0	0	36,67	0	0	0	0	2,20
4	Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	50	65	68,71	74,83	85,03	40	61,22	68,71	76,87	96,60	0,80	0,94	1	1,03	1,14
5	Persentase PD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo	Indeks	0,6	0,7	1,65	1,8	2	0,25	0,30	0,75	1	1,85	0,4	0,43	0,45	0,56	0,93
7	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	50,00	59,19	60	63,30	65,5	56,19	59,05	59,05	70	75,50	1,12	1,00	0,98	1,11	1,15
8	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks	0,10	0,12	0,14	0,14	0,17	0,14	0,14	0,14	0,07	0,20	1,4	1,17	1	0,5	1,18

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka,2023

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa telah ditetapkan 8 indikator pelayanan yaitu :

1. Indeks SPBE Kabupaten Sikka.

Rasio capaian kinerja Indeks SPBE Kabupaten Sikka, 1% dari tahun 2019 - tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 mencapai 1,83%, hal ini menunjukkan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Sikka mengalami peningkatan di tahun 2022.

2. Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE.

Rasio capaian kinerja cakupan perangkat daerah yang mengimplementasikan SPBE 1% pada tahun 2020 menjadi 0% pada tahun 2021 sedangkan tahun 2022 5,50%. hal ini menunjukkan ada peningkatan di tahun 2022.

3. Cakupan Aplikasi yang terintegrasi.

Rasio capaian kinerja Cakupan Aplikasi yang terintegrasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 masih dengan 0% hal ini disebabkan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka belum terintegrasi, sedangkan di tahun 2022 capaiannya sebesar 2,20%.

4. Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Rasio capaian kinerja Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,80 % pada tahun 2018, 0,94 % pada tahun 2019, 1% pada tahun 2020, menjadi 1,03% di tahun 2021 dan pada tahun 2022 capaian sebesar 1,14%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan dan sampai dengan saat ini tertinggal 22 titik daerah blank spot.

5. Persentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi.

Rasio capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi 0% dari tahun 2018 sampai dengan 2022 hal ini disebabkan karena belum adanya infrastruktur/system aplikasi yang mengintegrasikan data statistik sektoral setiap OPD.

6. Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo.

Rasio capaian kinerja Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo 0,4 % pada tahun 2018, 0,43 % pada tahun 2019, 0,45 pada tahun 2020, menjadi 0,56 tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 sebesar 0,93, hal ini menunjukkan ada peningkatan tetapi belum memenuhi standar pelayanan.

7. Indeks profesionalitas ASN.

Rasio capaian kinerja Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2018 1,12 %, 1,00

% di tahun 2019, 0,98 pada tahun 2020 selama 3 tahun tersebut mengalami penurunan dari target dan realisasi, sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 meningkat dari 1,11 % menjadi 1,15 %.

8. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

Rasio capaian kinerja Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada tahun 2018 1,4 %, 1,17 % di tahun 2019, 1 % pada tahun 2020, menjadi 0,50 % pada tahun 2021 sedangkan tahun 2022 sebesar 1,18, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2022 tetapi belum memenuhi standar pelayanan.

Ada beberapa jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Jumlah Media Massa

Jumlah Media Massa yang ada di kabupaten Sikka yang menjalin hubungan kerja-sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan konferensi press terdiri dari 32 media baik media elektonik, on line maupun media cetak hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Nama Media massa

NO	NAMA MEDIA	KETERANGAN
1	Pos Kupang	Elektronik / On Line dan Cetak
2	Flores Pos	Elektronik / On Line dan Cetak
3	Victory News	Elektronik / On Line dan Cetak
4	Timex Kupang	Elektronik / On Line dan Cetak
5	Liputan 6.Com	Elektronik / On Line
6	Cendana News.Com	Elektronik / On Line
7	Metrodunia.id/Metrotimor.id	Elektronik / On Line
8	Kumparan.Com	Elektronik / On Line
9	Bentara.Net	Elektronik / On Line
10	Oposisi.News	Elektronik / On Line
11	Lentera Pos	Elektronik / On Line
12	Suara Flores	Elektronik / On Line
13	TV One	Elektronik / On Line
14	TVRI	Elektronik / On Line
15	VoxNTT.Com	Elektronik / On Line
16	MNC	Elektronik / On Line
17	EKora NTT	Elektronik / On Line
18	Kompas TV	Elektronik / On Line

19	Zoneline News.Com	Elektronik / On Line
20	Maumere News. Com	Elektronik / On Line
21	Radio Suara Sikka	Elektronik / On Line
22	Suara Sikka.Com	Elektronik / On Line
23	Media Indonesia	Elektronik / On Line
24	Protokol dan Humas	Elektronik / On Line
25	Selatan Indonesia	Elektronik / On Line
26	Vivatimur.Com	Elektronik / On Line
27	Detak Terkinicom	Elektronik / On Line
28	NTT Pedia.id	Elektronik / On Line
29	Floresku	Elektronik / On Line
30	Flores News	Elektronik / On Line
31	Hak Rakyat	Elektronik / On Line
32	Suara Buruh	Elektronik / On Line

2. Jumlah Penyiaran Radio.

Lembaga siaran radio yang tersedia di Kabupaten Sikka sejumlah 1 stasiun yaitu LPPL Radio Suara Sikka yang di kelola oleh Dinas Kominfo guna melakukan pelayanan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan untuk masyarakat umum (pihak swasta) melalui kegiatan Talk Show, Live Streaming, Iklan, Radiogram dan pengumuman, selain itu juga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah (PAD).

3. Website milik Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki 1 Website yaitu www.sikkakab.go.id yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan bermanfaat untuk penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegiatan pempublikasian ini di laksanakan setiap hari (update) melalui konten – konten kegiatan pemerintah daerah.

4. Penyediaan Sarana Telekomunikasi.

Sarana Telekomunikasi yang tersedia di Kabupaten Sikka berupa menara telekomunikasi sebanyak 142 BTS/Tower yang tersebar di 21 Kecamatan yang terdiri dari 3 jenis BTS yaitu Telkomsel, XL Axiata dan Indosat.

5. Cakupan Pelayanan Publik berbasis Aplikasi

Untuk Layanan Publik melalui aplikasi berbasis SPBE secara on line dan terintegrasi yang tersedia di Kabupaten Sikka dan dikelola oleh Dinas Kominfo berjumlah 1 aplikasi yaitu Sideka-NG sedangkan layanan aplikasi publik yang lainnya ada di beberapa perangkat daerah antara lain Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Manajemen Kependudukan) pemilik pengguna oleh Dispenduk, Aplikasi SIPD pemilik pengguna oleh Bapelitbang dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Aplikasi SIMONEV pemilik pengguna oleh Bagian Administrasi Pembangunan, Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pemilik pengguna oleh Bagian Barang dan Jasa, Aplikasi E-Lapor pemilik pengguna oleh Bagian Organisasi, Aplikasi SAPK (Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian) pemilik pengguna oleh BKDPSPDM, Aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan) pemilik pengguna oleh Dinas PKO, dan Aplikasi Sicantik pemilik pengguna oleh Dinas Perijinan dan Pelayanan Terpadu. Selain itu juga Dinas Kominfo menyediakan jaringan internet gratis bagi masyarakat berupa Hotspot sebanyak 10 titik dan internet satelit(Visat) sebanyak 21 titik.

Kinerja anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dapat digambar sebagai berikut ini :

1. Pendapatan

➤ Retribusi Jasa Umum.

- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu :
 - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2018 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 143.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 136.197.034,- atau 95,24 %.
 - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2019 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 152.502.000,- dan realisasi sebesar Rp. 109.985.532,- atau 72,12 %.
 - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2020 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 160.954.000,- dan realisasi sebesar Rp. 126.303.478,- atau sebesar 78,47 %.
 - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2021 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 160.954.000,- dan realisasi sebesar Rp. 48.696.864,- atau 30,26 %.
 - Tahun 2022 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 160.954.000,- dan realisasi sebesar Rp. 156.044.145,- atau 96,95 %.

➤ Retribusi Jasa Usaha.

- Retribusi Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu :

- Penerimaan Retribusi Jasa Radio pada tahun 2019 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 20.550.000,- atau 41,10 %.
- Penerimaan Retribusi Jasa Radio pada tahun 2020 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.350.000,- atau sebesar 125,40 %.
- Penerimaan Retribusi Jasa Radio pada tahun 2021 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.780.000,- atau 55,12 %.
- Tahun 2022 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.840.000,- atau 27,36 %.

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa kinerja penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) selama 5 tahun yaitu dari tahun 2018 – 2022 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -3,72 % sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -3,01 %, hal ini menunjukan kinerja penerimaan masih dibawah target.

2. Belanja

- ❖ Pada Tahun 2018 alokasi anggaran sebesar Rp. 4.033.071.738,- yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.374.161.134,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.658.910.604,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.616.125.036,- atau sebesar 89,66 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan pembiayaan pelaksanaan 7 program dan 28 kegiatan.
- ❖ Tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 3.605.364.162,- yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.315.765.122,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.289.599.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.421.473.004,- atau sebesar 94,90 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan pembiayaan pelaksanaan 6 program dan 28 kegiatan.
- ❖ Tahun 2020 alokasi anggaran sebesar Rp. 2.922.195.667,- yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.138.658.717,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 783.536.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.856.208.661,- atau sebesar 97,74 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan pembiayaan pelaksanaan 6 program dan 23 kegiatan.

- ❖ Alokasi Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.644.177.347,- dan realisasi sebesar Rp. 3.085.628.096,- atau sebesar 84,67 %. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan sebanyak 5 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan
- ❖ Pada tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp. 3.045.312.540,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.810.942.320,- atau sebesar 92,30 %. Alokasi anggaran ini dimanfaatkan untuk pembiayaan sebanyak 2 program, 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukan bahwa rata – rata pertumbuhan anggaran sebesar -1,17 % dan rata – rata pertumbuhan realisasi mencapai -1,16 % selama 3 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sedangkan rata – rata pertumbuhan anggaran sebesar -0,2 % dan rata – rata pertumbuhan realisasi mencapai -0,1 %, selama 2 tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2020

Permedagri 13/2006	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggar an	Realis asi
PENDAPATAN	143.000.000	202.502.000	185.954.000	136.197.034	130.535.532	157.653.478	95,24	64,46	84,78	-1,12	-0,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.000.000	202.502.000	185.954.000	136.197.034	130.535.532	157.653.478	95,24	64,46	84,78	-1,12	-0,80
Hasil Retribusi Daerah	143.000.000	202.502.000	185.954.000	136.197.034	130.535.532	157.653.478	95,24	64,46	84,78	-1,12	-0,80
- Retribusi Jasa Umum	143.000.000	152.502.000	160.954.000	136.197.034	109.985.532	126.303.478	95,24	72,12	78,47	-0,94	-0,88
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi –LRA	143.000.000	152.502.000	160.954.000	136.197.034	109.985.532	126.303.478	95,24	72,12	78,47	-0,94	-0,88
-Pengawasan dan Pengendalian Tower Telekomunikasi	143.000.000	152.502.000	160.954.000	136.197.034	109.985.532	126.303.478	95,24	72,12	78,47	-0,94	-0,88
- Retribusi Jasa Usaha	0	50.000.000	25.000.000	0	20.550.000	31.350.000	0,00	41,10	125,40		
- Retribusi Jasa Radio	0	50.000.000	25.000.000	0	20.550.000	31.350.000	0,00	41,10	125,40		
- Penerimaan Jasa Penyiran Radio	0	50.000.000	25.000.000	0	20.550.000	31.350.000	0,00	41,10	125,40		
BELANJA	4.033.071.738	3.605.364.162	2.922.195.667	3.616.125.036	3.421.473.004	2.856.208.661	89,66	94,90	97,74	-1,17	-1,16
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.374.161.134	2.315.765.122	2.138.658.717	2.262.951.793	2.222.044.020	2.108.557.935	95,32	95,95	98,59	-1,07	-1,05
BELANJA LANGSUNG	1.658.910.604	1.289.599.040	783.536.950	1.353.173.243	1.199.428.984	747.650.726	81,57	93,01	95,42	-1,31	-1,33
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	689.980.046	464.207.310	355.542.570	649.966.289	395.542.648	327.887.889	94,20	85,21	92,22	-1,16	-1,10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	1.050.000	689.500	475.000	1.041.500	68,95	95,00	99,19	-0,45	-0,18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.677.604	182.300.000	122.500.000	237.128.848	114.464.588	97.716.055	86,33	62,79	79,77	-1,22	-1,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.418.000	3.768.000	3.768.000	3.418.000	3.188.750	3.103.730	100,00	84,63	82,37	-1,00	-1,02
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	39.425.000	43.740.000	30.666.000	39.425.000	43.740.000	30.666.000	100,00	100,00	100,00	-1,33	-1,33
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.823.384	24.895.060	26.642.700	22.726.184	24.695.410	26.485.834	99,57	99,20	99,41	-0,92	-0,92
Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.683.958	18.790.000	16.132.200	17.683.958	18.790.000	16.132.200	100,00	100,00	100,00	-1,15	-1,15
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.491.500	5.703.100	6.412.100	8.491.500	5.703.100	6.412.100	100,00	100,00	100,00	-0,92	-0,92
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.501.010	4.490.770	4.500.000	4.501.010	4.490.770	100,00	100,00	100,00	-1,00	-1,00

Permedagri 13/2006	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	100,00	100,00	100,00	-1,00	-1,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000	9.000.000	7.800.000	9.997.000	9.000.000	7.800.000	99,97	100,00	100,00	-1,12	-1,12
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	261.095.600	120.170.140	52.615.800	259.066.299	120.169.790	50.674.700	99,22	100,00	96,31	-1,26	-1,27
Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya dalam daerah	46.025.000	50.000.000	82.625.000	46.000.000	49.975.000	82.525.000	99,95	99,95	99,88	-0,29	-0,29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.935.000	65.870.700	60.012.900	154.934.835	65.833.700	60.012.323	100,00	99,94	100,00	-1,04	-1,04
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0		100,00	0,00		
Pengadaan Mebeluer	10.000.000	15.000.000	0	10.000.000	15.000.000	0	100,00	100,00	9,00	-2,50	-2,50
Pengadaan Komputer	76.760.000	6.400.000	10.700.000	76.760.000	6.400.000	10.700.000	100,00	100,00	100,00	-0,94	-0,94
Pengadaan Alat Komunikasi	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	13.070.000	0	0	13.070.000	0,00	0,00	100,00		
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	27.925.000	26.970.700	24.992.900	27.924.835	26.933.700	24.992.323	100,00	99,86	100,00	-1,07	-1,07
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	100,00	100,00	0,00	-2,00	-2,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	0	3.500.000	6.250.000	0	3.500.000	6.250.000	0,00	100,00	100,00		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat Studio	10.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00	-1,50	-1,50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat Komunikasi	25.750.000	0	0	25.750.000	0	0	100,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.253.162	97.956.250	0	60.686.429	94.094.595	0	83,99	96,06	0,00	-2,36	-2,55
Pendidikan dan Pelatihan Formal	21.050.000		0	9.516.600		0	45,21	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	51.203.162	97.956.250	0	51.169.829	94.094.595	0	99,93	96,06	0,00	-2,91	-2,84
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	23.939.850	0	0	23.889.850	0,00	0,00	99,79		
Penyusunan Lapoaran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	23.939.850	0	0	23.889.850	0,00	0,00	99,79		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	321.398.150	194.314.900	36.366.000	69.858.150	193.342.900	31.366.000	21,74	99,50	86,25	-1,49	-3,32
Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	0	89.372.400	0	0	89.372.400	0	0,00	100,00	0,00		

Permedagri 13/2006	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	267.639.900	45.283.450	36.366.000	16.099.900	45.283.450	31.366.000	6,02	100,00	86,25	-1,03	-1,86
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan komunikasi dan informasi	0	8.795.050	0	0	8.795.050	0	0,00	100,00	0,00		
Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	3.758.250	16.808.000	0	3.758.250	15.911.000	0	100,00	94,66	0,00	-5,47	-5,23
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	50.000.000	34.056.000	0	50.000.000	33.981.000	0	100,00	99,78	0,00	-1,68	-1,68
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	311.194.046	281.088.630	281.312.730	310.027.340	264.503.891	278.131.764	99,63	94,10	98,87	-1,00	-0,96
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	113.091.550	54.219.600	269.302.730	112.878.150	53.695.300	266.121.764	99,81	99,03	98,82	0,90	0,88
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	198.102.496	226.869.030	0	197.149.190	210.808.591	0	99,52	92,92	0,00	-2,15	-2,07
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	0	0	12.010.000	0	0	12.010.000	0,00	0,00	100,00		
Program Pengembangan Data / Informasi	53.700.700	186.161.250	26.362.900	53.700.700	186.111.250	26.362.900	100,00	99,97	100,00	-3,98	-3,97
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	53.700.700	186.161.250	26.362.900	53.700.700	186.111.250	26.362.900	100,00	99,97	100,00	-3,98	-3,97
Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program/Kegiatan Pembangunan	55.449.500	0	0	53.999.500	0	0	97,39	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pengendalian dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	55.449.500	0	0	53.999.500	0	0	97,39	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka

Permedagri 90/2019	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN								
PENDAPATAN ASLI DAERAH	185.954.000	185.954.000	62.476.864	162.884.145	33,60	87,59	0,0	1,6
- Retribusi Jasa Umum	160.954.000	160.954.000	48.696.864	156.044.145	30,26	96,95	0,0	2,2
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.954.000	160.954.000	48.696.864	156.044.145	30,26	96,95	0,0	2,2
Retribusi Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	25.000.000	25.000.000	13.780.000	6.840.000	55,12	27,36	0,0	-0,5
Retribusi Jasa Radio	25.000.000	25.000.000	13.780.000	6.840.000	55,12	27,36	0,0	-0,5
BELANJA	3.644.117.347	3.045.312.540	3.085.628.096	2.810.942.320	84,67	92,30	-0,2	-0,1
BELANJA OPERASIONAL	2.686.354.874	3.020.312.540	2.582.718.915	2.786.696.400	96,14	92,27	0,1	0,1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2.686.354.874	3.020.312.540	2.582.718.915	2.786.696.400	96,14	92,27	0,1	0,1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.597.300	9.999.900	32.597.300	9.999.900	100	100	-0,7	-0,7
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.795.500	0	4.795.500	0,00	100	0,00	-1,0	-1,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.801.800	9.999.900	27.801.800	9.999.900	100	100	-0,6	-0,6

Permedagri 90/2019	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.274.452.485	2.471.324.203	2.210.454.755	2.300.048.539	97,19	93,07	0,1	0,0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.231.552.485	2.435.624.203	2.172.854.755	2.273.200.839	97,37	93,33	0,1	0,0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	35.700.000	37.600.000	26.847.700	87,65	75,20	-0,2	-0,3
Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.057.000	76.833.200	111.068.200	60.457.060	81,04	78,69	-0,4	-0,5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.700	0	3.499.700	0	100,00	0,00	-1,0	-1,0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.730.600	12.913.000	13.730.600	0	100,00	0,00	-0,1	-1,0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.360.000	0	9.360.000	0	100,00	0,00	-1,0	-1,0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.062.700	5.977.200	6.062.500	5.977.200	100,00	100,00	0,0	0,0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	840.000	0	840.000	0	100,00	0,00	-1,0	-1,0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.564.000	57.943.000	77.575.400	54.479.860	74,91	94,02	-0,4	-0,3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.188.189	405.775.787	173.716.422	360.749.711	92,80	88,90	1,2	1,1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	418.500	0	418.500	0	100,00	0,00	-1,0	-1,0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.455.689	140.764.907	114.137.138	96.879.311	89,55	68,82	0,1	-0,2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	13.114.200	0	13.114.200	0,00	100,00	0,0	0,0

Permedagri 90/2019	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.314.000	251.896.680	59.160.784	250.756.200	99,74	99,55	3,2	3,2
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.059.900	56.379.450	54.882.238	55.441.190	99,68	98,34	0,0	0,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.919.900	40.379.450	34.742.238	39.441.190	99,49	97,68	0,2	0,1
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.140.000	16.000.000	20.140.000	16.000.000	100,00	100,00	-0,2	-0,2
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	839.318.673	0	415.115.481	0	49,46	0,00	-1,0	-1,0
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	839.318.673	0	415.115.481	0	49,46	0,00	-1,0	-1,0
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	202.893.600	0	0	0	0,00	0	-1,0	0,0
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	312.925.073	0	290.515.481	0	92,84	0	-1,0	-1,0
Layanan Hubungan Media	127.000.000	0	115.000.000	0	90,55	0	-1,0	-1,0
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	25.725.000	0	9.600.000	0	37,32	0	-1,0	-1,0
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	170.775.000	0	0	0	0,00	0	-1,0	0,0
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	36.570.300	0	31.170.300	0	85,23	0,00	-1,0	-1,0
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.570.300	0	31.170.300	0	85,23	0,00	-1,0	-1,0

Permedagri 90/2019	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.570.300	0	31.170.300	0	85,23	0	-1,0	-1,0
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	33.473.500	25.000.000	33.423.400	0	99,85	0,00	-0,3	-1,0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.473.500	25.000.000	33.423.400	0	99,85	0,00	-0,3	-1,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	33.473.500	25.000.000	33.423.400	0	99,85	0,00	-0,3	-1,0
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	48.400.000	0	23.200.000	24.245.920	47,93	0,00	-1,0	0,0
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.400.000	0	23.200.000	24.245.920	47,93	0,00	-1,0	0,0
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	48.400.000	0	23.200.000	24.245.920	47,93	0	-1,0	0,0

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2023

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi capaian indikator tersebut maka tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Hacker / cyber crime
2. Masih terdapat daerah blank spot
3. Kurang pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan TIK

Sedangkan Peluang yang memungkinkan untuk pengembangan layanan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Adanya kelembagaan forum satu data
2. Adanya regulasi ttg SPBE, Satu Data Indonesia, Komunikasi Publik
3. Adanya perangkat pemerintahan sebagai produsen data dan PPID Pembantu
4. Adanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
5. Adanya SIPD RI (ewalidata)
6. Tersedianya BTS dan penguat sinyal

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang terdiri atas 3(tiga) urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka 2024 – 2026.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Masalah - masalah tersebut dijabarkan kedalam masalah pokok, masalah dan akar masalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masalah Pokok Masih rendahnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Masalah pokok masih rendahnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh masalah Masih Rendahnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Masalah Masih Rendahnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik disebabkan oleh beberapa akar masalah :

- 1) Belum adanya regulasi pendukung Sistem Informasi
 - 2) Belum Tersedianya Infrstruktur Sistem Informasi yang Terintegrasi
2. Masalah Pokok Masih Rendahnya Fasilitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada daerah blank spoot di Kabupaten Sikka.

Masalah pokok Masih Rendahnya Fasilitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada daerah blank spoot di Kabupaten Sikka, disebabkan oleh masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta SDM infrastruktur.

Masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta SDM infrastruktur disebabkan oleh beberapa akar masalah :

- 1) Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang belum memenuhi target.
 - 2) Jumlah Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi standar.
 - 3) Belum tersedianya SDM TIK yang bersertifikat
3. Masalah Pokok Masih rendahnya informasi bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Masalah pokok masih rendahnya informasi bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh masalah Masih kurangnya diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Masalah Masih kurangnya diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu :

- 1) Kurangnya dukungan informasi penyelenggaraan pemerintahan dari perangkat daerah.
 - 2) Belum berfungsinya PPID (Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) pemerintah daerah.
4. Masalah Pokok Belum optimalnya Tata kelola data statisitik sektoral Kabupaten Sikka dalam sikka satu data.

Masalah Pokok Belum optimalnya Tata kelola data statisitik sektoral Kabupaten Sikka dalam sikka satu data disebabkan oleh beberapa masalah antara lain :

1. Ketersediaan data belum optimal

Masalah Ketersediaan data belum optimal disebabkan oleh beberapa akar masalah antara lain :

- 1) Data belum terintegrasi
- 2) Masih rendahnya kapasitas pengelola data statistik sektoral
- 3) Belum tersedianya infrastruktur yang mendukung kemudahan akses data

2. Kurangnya kesadaran akan pemanfaat data dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Masalah Kurangnya kesadaran akan pemanfaat data dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan disebabkan oleh beberapa akar masalah antara lain :

- 1) Masih Minimnya pemahaman OPD akan pentingnya Data

- 2) Pengupulan data belum sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan Statistik
5. Masalah Pokok Masih rendahnya Penyelenggaraan sistem Pengamanan data dan Informasi Pemerintah Daerah.

Masalah Pokok Masih rendahnya Penyelenggaraan sistem Pengamanan data dan Informasi Pemerintah Daerah disebabkan oleh beberapa masalah antara lain :

1. Masih rendahnya penerapan teknologi keamanan data dan informasi.
Masalah masih rendahnya penerapan teknologi keamanan data dan informasi disebabkan oleh beberapa akar masalah antara lain :
- 1) Belum tersedianya regulasi pendukung sistem keamanan informasi
 - 2) Belum tersedianya infranstruktur layanan keamanan data dan informasi.

2. Belum terbentuknya Tim Pengaman Informasi.
Masalah belum terbentuknya Tim Pengaman Informasi disebabkan oleh beberapa akar masalah antara lain :
- 1) Belum tersedianya SDM yang berkompeten di bidang persandian (Sandiman)
 - 2) Belum terbentuknya Tim Pengendali Informasi daerah.

Berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang diuraikan diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Masih Rendahnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Belum adanya regulasi pendukung Sistem Informasi
			Belum Tersedianya Infrstruktur Sistem Informasi yang Terintegrasi
2	Masih Rendahnya Fasilitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada daerah blank spoot di Kabupaten Sikka	Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta SDM Infrastruktur	Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang belum memenuhi target
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi standar
			Belum tersedianya SDM TIK yang bersertifikat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Masih rendanya informasi bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan	Masih kurangnya diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	Kurangnya dukungan informasi penyelenggaraan pemerintahan dari perangkat daerah
			Belum berfungsinya PPID (Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) pemerintah daerah
4	Belum optimalnya Tata kelola data statisitik sektoral Kabupaten Sikka dalam sikka satu data	Ketersediaan data belum optimal	Data belum terintegrasi
			Masih rendanya kapasitas pengelola data statistik sektoral
			Belum tersedianya infrastruktur yang mendukung kemudahan akses data
		kurangnya kesadaran akan pemanfaat data dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	Masih Minimnya pemahaman OPD akan pentingnya Data
			Pengupulan data belum sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan Statistik
5	Masih rendahnya Penyelenggaraan sistem Pengamanan data dan Informasi Pemerintah Daerah	Masih rendahnya penerapan teknologi keamanan data dan informasi	Belum tersedianya regulasi pendukung sistem keamanan informasi
			Belum tersedianya infranstruktur layanan keamanan data dan informasi
		Belum terbentuknya Tim Pengaman Informasi	Belum tersedianya SDM yang berkompeten di bidang persandian (Sandiman)
			Belum terbentuknya Tim Pengendali Informasi daerah

3.2. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian terkait erat dengan isu strategis Daerah yaitu Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami beberapa faktor penghambat dan pendorong.

Faktor -faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

Isu Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Belum optimalnya pelayanan data dan Informasi berbasis SPBE	Masih Rendanya Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Kurangnya Diklat dan Bimtek Teknis Bagi aparatur	Adanya perda ttg pengelolaan radio dan perbub (ttg PPID, penyelenggaraan statistik sektoral dan Sikka Satu Data)
	Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta SDM Infrastruktur	Belum tersedianya arsitektur SPBE	Adanya SOP tata kerja dinas
	Masih kurangnya diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	Belum tersedianya sistem pengamanan data dan informasi	Adanya data dan informasi
	Ketersediaan data belum optimal	Masih rendahnya Kapasitas Radio dan website Pemda dalam penyebaran data dan informasi	Adanya kelembagaan forum satu data
	kurangnya kesadaran akan pemanfaat data dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	Hacker / cyber crime	Adanya regulasi ttg SPBE, Satu Data Indonesia, Komunikasi Publik
	Masih rendahnya penerapan teknologi keamanan data dan informasi	Masih terdapat daerah blank spot	Adanya perangkat pemerintahan sebagai produsen data dan PPID Pembantu
	Belum terbentuknya Tim Pengaman Informasi	Kurang pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan TIK	Adanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
			Adanya SIPD RI (ewalidata)
			Tersedianya BTS dan penguat sinyal

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2023

3.3. PENENTUAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisa faktor pendorong dan penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika, maka ditentukan isu strategis yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

Isu strategis ini menjadi hal yang sangat urgen untuk pengambilan solusi dalam hal antisipasi, penanggulangan masalah, maupun rencana tindaklanjut yang perlu diupayakan, isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026 yaitu Belum optimalnya pelayanan data dan Informasi berbasis SPBE.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

Tujuan adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka. Oleh sebab itu perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026. Hal ini dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dalam upaya pencapaian Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kebijakan publik.

Tujuan Meningkatnya kualitas kebijakan publik dengan **Indikator Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran – sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurung waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik.

Sasaran Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik dengan **Indikator Kebijakan internal SPBE, Indikator Tata Kelola SPBE dan Indikator Manajemen SPBE.**

Dari tujuan dan sasaran serta indikator tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kebijakan publik	Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik	Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2,18	2,28
			Kebijakan internal SPBE	2	1	2
			Tata Kelola SPBE	0,20	0,40	0,60
			Manajemen SPBE	0,25	0,50	0,75

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka Tahun 2023

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Untuk Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tujuan/indikator tujuan	Sasaran/Indikator sasaran		Program		Indikator Program	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub kegiatan/indikator Sub kegiatan		Indikator Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas kebijakan publik	1	Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Indikator : Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indikator :							2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
		Kebijakan internal SPBE							3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
		Tata Kelola SPBE							4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		Manajemen SPBE							5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
									6	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media
									7	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis
									8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya
									9	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan

Tujuan/indikator tujuan	Sasaran/ Indikator sasaran		Program		Indikator Program	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub kegiatan/indikator Sub kegiatan		Indikator Sub Kegiatan
									10	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			2	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
									2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah :
											1. Instalasi ruang data center / Network operating Center (NOC)
											2. Instalasi Control Room Komando center
											3. Jaringan Intranet (fiber optic)
											4. Komando center
											5. Disaster Recovery Center (DRC)

Tujuan/indikator tujuan	Sasaran/Indikator sasaran		Program		Indikator Program	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub kegiatan/indikator Sub kegiatan		Indikator Sub Kegiatan
						2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e-government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
									2	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
									3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah :
											1. Pemasangan Wifi Internet (Hot Spot)
											2. Pembangunan Tower
											3. Pembangunan VSAT (Visat Satelit Internet)
									4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Tujuan/indikator tujuan	Sasaran/Indikator sasaran		Program		Indikator Program	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub kegiatan/indikator Sub kegiatan		Indikator Sub Kegiatan
			3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral untuk Penyusunan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
									2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
									3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
									4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS
									5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik
									6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun
			4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan

Tujuan/indikator tujuan	Sasaran/Indikator sasaran		Program		Indikator Program	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub kegiatan/indikator Sub kegiatan		Indikator Sub Kegiatan
									2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
									3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
									4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan			1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Tujuan/indikator tujuan	Sasaran/Indikator sasaran		Program		Indikator Program	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub kegiatan/indikator Sub kegiatan		Indikator Sub Kegiatan
									2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
									3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
									2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
						4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
									2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
									3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
									4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Tujuan/indikator tujuan	Sasaran/Indikator sasaran		Program		Indikator Program	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub kegiatan/indikator Sub kegiatan		Indikator Sub Kegiatan
									5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan
									6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
									2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
									3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
						6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo	1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
									2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
									3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Tujuan/indikator tujuan	Sasaran/Indikator sasaran		Program		Indikator Program	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub kegiatan/indikator Sub kegiatan		Indikator Sub Kegiatan
									4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
									2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara
									3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
									4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 3 (tiga) tahun ke depan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan SIPD RI dan kelembagaan forum satu data melalui perangkat pemerintahan sebagai produsen data dan PPID Pembantu untuk meningkatkan kualitas data dan informasi.
2. Mengoptimalkan regulasi ttg SPBE, Satu Data Indonesia, Komunikasi Publik dan SOP dalam menjamin pelaksanaan TIK serta mencegah terjadinya hacker / cyber crime.
3. Meningkatkan Diklat dan Bimtek TIK bagi aparatur sebagai produsen data dan PPID Pembantu untuk mencegah hacker / cyber crime.
4. Menyusun Arsitektur SPBE dengan mengoptimalkan regulasi untuk perencanaan pembangunan BTS dan penguat signal guna mengurangi daerah blank spot.
5. Mengoptimalkan TIK, BTS dan Penguat sinyal untuk meningkatkan penyediaan sistem pengamanan data dan informasi.
6. Memperkuat kapasitas Radio dan Website Pemda dalam penyebaran data dan informasi serta meningkatkan perangkat pemerintahan sebagai produsen data dan PPID Pembantu guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan TIK.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi diatas yaitu dengan merumuskan arah kebijakan antara lain dengan Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui penyusunan Arsitek SPBE, memperkuat kapasitas Radio dan Website Pemda dalam penyebaran data dan informasi, diklat dan bimtek perangkat pemerintahan sebagai produsen data dan PPID Pembantu dengan mengoptimalkan regulasi, SIPD RI dan kelembagaan forum satu data serta TIK, BTS dan Penguat sinyal untuk penyebaran data dan informasi serta upaya pencegahan terjadinya hacker / cyber crime.

Untuk menerangkan hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas kebijakan publik	Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik	Mengoptimalkan SIPD RI dan kelembagaan forum satu data melalui perangkat pemerintahan sebagai produsen data dan PPID Pembantu untuk meningkatkan kualitas data dan informasi	Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui penyusunan Arsitektur SPBE, memperkuat kapasitas Radio dan Website Pemda, diklat dan bimtek perangkat pemerintahan sebagai produsen data dan PPID Pembantu dengan mengoptimalkan regulasi, SIPD RI dan kelembagaan forum satu data serta TIK, BTS dan Penguat sinyal untuk penyebaran data dan informasi serta upaya pencegahan terjadinya hacker / cyber crime	Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui penyusunan Arsitektur SPBE, diklat dan bimtek perangkat pemerintahan sebagai produsen data dan PPID Pembantu dengan mengoptimalkan regulasi, SIPD RI dan kelembagaan forum satu data serta TIK, BTS dan Penguat sinyal untuk penyebaran data dan informasi serta upaya pencegahan terjadinya hacker / cyber crime	Meningkatkan kualitas data dan informasi dengan mengoptimalkan regulasi, SIPD RI dan kelembagaan forum satu data serta TIK, BTS dan Penguat sinyal untuk penyebaran data dan informasi serta upaya pencegahan terjadinya hacker / cyber crime
		Mengoptimalkan regulasi ttg SPBE, Satu Data Indonesia, Komunikasi Publik dan SOP dalam menjamin pelaksanaan TIK serta mencegah terjadinya hacker / cyber crime			
		Meningkatkan Diklat dan Bimtek TIK bagi aparatur sebagai produsen data dan PPID Pembantu untuk mencegah hacker / cyber crime			
		Menyusun Arsitektur SPBE dengan mengoptimalkan regulas untuk perencanaan pembangunan BTS dan penguat signal guna mengurangi daerah blank spot			
		Mengoptimalkan TIK, BTS dan Penguat sinyal untuk meningkatkan penyediaan sistem pengamanan data dan informasi.			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
		Memperkuat kapasitas Radio dan Website Pemda dalam penyebaran data dan informasi serta meningkatkan perangkat pemerintahan sebagai produsen data dan PPID Pembantu guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan TIK			

BAB VI

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indicator outcome program dan juga indicator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024 - 2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Tahun Renstra PD						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kualitas kebijakan publik				Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,83	2		2,18		2,28		2,28	
	Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik			Kebijakan internal SPBE	Dok	0	2		1		2		5	
				Tata Kelola SPBE	%	0	0,20		0,40		0,60		0,60	
				Manajemen SPBE	%	0	0,25		0,50		0,75		0,75	
		2:16:00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					523.391.900		400.043.652		412.044.967	1.185.480.519	
		2:16:02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	Media	5	5	373.391.900	5	400.043.652	5	412.044.967	1.185.480.519	Dinas Kominfo
		2. 16. 02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Media	5	5	373.391.900	5	400.043.652	5	412.044.967	1.185.480.519	Dinas Kominfo

		2. 16. 02. 2.01 .01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dok	3	2	135.000.000	2	320.000.000	1	23.000.000	478.000.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 02. 2.01 .02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dok	1	1	20.000.000	1	10.000.000	1	23.000.000	53.000.000	Kab. Sikka
		2. 16. 02. 2.01 .04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dok	1	1	10.000.000	0	-	1	20.000.000	30.000.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 02. 2.01 .05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dok	5	5	20.000.000	5	10.000.000	5	22.000.000	52.000.000	Kab. Sikka
		2. 16. 02. 2.01 .06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dok	1	2	60.000.000	2	25.000.000	2	52.000.000	137.000.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 02. 2.01 .07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	1	0	-	0	-	0	-	-	Dinas Kominfo
		2. 16. 02. 2.01 .09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dok	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	30.000.000	60.000.000	Kab. Sikka
		2. 16. 02. 2.01 .10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Org	0	11	45.391.900	0	-	12	22.000.000	67.391.900	Kab. Sikka
		2. 16. 02. 2.01 .12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dok	1	1	40.000.000	1	16.293.652	2	64.294.967	120.588.619	Dinas Kominfo & 21 Kec.

		2. 16. 02. 2.01 .13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	2	28.000.000	2	3.750.000	4	155.750.000	187.500.000	Jakarta
		2:16:03	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	%	26,7	40	150.000.000	60	154.500.000	80	159.135.000	463.635.000	
		2.16.03. 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain	Dok	8	10	-					-	
		2.16.03. 2.01 .02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	8	0	-					-	Dinas Kominfo
		2.16.03. 2.01 .03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah :	Unit								-	Dinas Kominfo
				1. Instalasi ruang data center / Network operating Center (NOC)	Unit	0	0	-					-	Dinas Kominfo
				2. Instalasi Control Room Komando center	Unit	0								Dinas Kominfo
				3. Jaringan Intranet (fiber optic)	Unit	0								Dinas Kominfo
				4. Komando center	Unit	0							-	Dinas Kominfo
				5. Disaster Recovery Center (DRC)	Unit	0							-	Dinas Kominfo

		2.16.03. 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e- government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	OPD	4	2	150.000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	463.635.000	Dinas Kominfo
		2.16.03. 2.02 .01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	150.000.000	Dinas Kominfo
		2.16.03. 2.02 .04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dok	0	0	-	0	-	0	-	-	Dinas Kominfo
		2.16.03. 2.02 .08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	3	3	100.000.000	13	150.000.000	13	250.000.000	100.000.000	Kab. Sikka
				1. Pemasangan Wifi Internet (Hot Spot)	Titik	12	0	-	0	-	0	-	-	Kab. Sikka
				2. Pembangunan Tower	Titik	122	5		5		5			Kab. Sikka
				3. Pembangunan VSAT (Visat Satelit Internet)	Titik	75	75		75		75			Kab. Sikka
		2.16.03. 2.02 .10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dok	0	0	-					-	Dinas Kominfo

		2:20:00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					177.526.600		182.852.398		188.337.970	548.716.968	
		2:20:02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral untuk Penyusunan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	32,7 9	100	177.526.600	100	182.852.398	100	188.337.970	548.716.968	Kabupa ten Sikka, Provins i NTT, dan Pusat
		2.20.02 .2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	%	40	90	177.526.600	100	182.852.398	100	188.337.970	548.716.968	Kabupat en Sikka, Provinsi NTT, dan Pusat
		2.20.02 .2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok	1	1	52.526.600	1	52.852.398	1	53.337.970	158.716.968	Kabupate n Sikka, Provinsi NTT, dan Pusat
		2.20.02 .2.01 .02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Org	0	80	40.000.000	42	30.000.000	3	50.000.000	120.000.000	Kab. Sikka/Ja karta
		2.20.02 .2.01 .03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	45.000.000	Kab. Sikka
		2.20.02 .2.01 .04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Org	0	61	70.000.000	61	70.000.000	61	70.000.000	210.000.000	Bappelit bang

		2.20.02 .2.01 .05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2.20.02 .2.01 .06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok	3	0	0	1	15.000.000	0	0	15.000.000	Kab. Sikka
		2:21:00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					150.000.000		154.500.000		159.135.000	100	
		2:21:02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	%	0	50	150.000.000	70	154.500.000	100	159.135.000	463.635.000	Kab. Sikka, Provinsi & Pusat
		2.21.02 .2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	%	0	50	150.000.000	70	154.500.000	100	159.135.000	463.635.000	Kab. Sikka, Provinsi & Pusat
		2.21.02 .2.01 .01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dok	0	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	20.000.000	Kab. Sikka
		2.21.02 .2.01 .02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	1	75.000.000	1	104.500.000	1	90.135.000	269.635.000	Kab. Sikka/Jakarta
		2.21.02 .2.01 .03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	0	25	35.000.000	16	15.000.000	16	10.000.000	60.000.000	Kab. Sikka
		2.21.02 .2.01 .01	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	0	20	40.000.000	7	25.000.000	18	49.000.000	114.000.000	Kab. Sikka

Meningkatnya Efektivitas penyelenggara an Pemerintahan				Persentase Layanan administrasi	%	100	100		100		100		-	Kab. Sikka
	Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks profesionalitas ASN	Indeks	78,50	80		83		85		85	
		2. 16. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	3.134.635.185	100	3.223.224.241	100	3.311.120.968	9.668.980.394	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	Dok	9	6	20.000.000	6	21.000.000	6	23.000.000	64.000.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	0		0				-	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	20.000.000	6	21.000.000	6	23.000.000	64.000.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Bln	12	12	2.504.435.185	12	2.524.361.241	12	2.542.294.968	7.571.091.394	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	28	28	2.462.758.255	30	2.470.861.241		2.485.294.968	7.418.914.464	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	18	8	11.129.730	12	22.500.000	15	25.000.000	58.629.730	Dinas Kominfo

		2. 16. 01. 2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	15	30.547.200	15	31.000.000	15	32.000.000	93.547.200	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	%	100	100	-		-		-	-	
		2. 16. 01. 2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	0								Kab. Sikka/Luar Wilayah Kab. Sikka
		2. 16. 01. 2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Org	0								Kab. Sikka
		2. 16. 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	%	100	100	54.000.000	100	80.413.000	100	121.326.000	255.739.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	9.000.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0		1	7.413.000	2	19.326.000	26.739.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	3.500.000	1	5.500.000	1	6.000.000	15.000.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	5.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	20.500.000	Dinas Kominfo

		2. 16. 01. 2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	0	0						-	Kab. Sikka
		2. 16. 01. 2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	6	42.500.000	8	57.000.000	13	85.000.000	184.500.000	Wilayah Luar Kab. Sikka
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks	0,25	0,30		0,35		0,40		0,40	
		2. 16. 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	%	100								
		2. 16. 01. 2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0						-	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0						-	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.07 .09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0						-	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo	%	100	100	493.750.000		515.000.000		528.550.000	1.537.300.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000	4.500.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	161.500.000	4	175.500.000	4	183.550.000	520.550.000	Dinas Kominfo

		2. 16. 01. 2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5	10.500.000	5	16.500.000	5	20.500.000	47.500.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	320.250.000	3	321.500.000		323.000.000	964.750.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	%	100	100	62.450.000		82.450.000		95.950.000	240.850.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	35.950.000	3	40.950.000	3	45.450.000	122.350.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.09 .05	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0		0		0		-	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	6	21.000.000	14	26.000.000	17	35.000.000	82.000.000	Dinas Kominfo
		2. 16. 01. 2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	5.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000	36.500.000	Dinas Kominfo

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila indikator kinerja ini didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan kinerja Perangkat Daerah pada hasil pengukuran yang handal (reliable) menyangkut program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tiga tahun.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, maka perencanaan kegiatan sudah dapat diukur untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka 2024 – 2026. Dengan demikian kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tiga tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada penetapan tujuan dan sasaran dalam RPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka
Tahun 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Tahun Akhir RPD
			2024	2025	2026	
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,83	2	2,18	2,28	2,28
2	Kebijakan internal SPBE	0	2	1	2	5
3	Tata Kelola SPBE	0	0,20	0,40	0,60	0,60
4	Manajemen SPBE	0	0,25	0,50	0,75	0,75

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026. Selama kurun waktu tiga tahun ke depan, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Sikka periode berikutnya.

Pembangunan yang berlangsung tiga tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dibidang Komunikasi dan Infomasi, tetapi sekaligus mampu mengatasi kesenjangan antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan. Selain hal tersebut pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama tigatahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.